

Peran Komite Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah Di MI Ma'arif 03 Limbangan Cilacap

Sarno Hanipudin¹⁾, Zulaekha²⁾

¹⁾Jurusan Tarbiyah, STAI Sufyan Tsauri Majenang
E-mail: mashan_1985@yahoo.com

²⁾Jurusan Tarbiyah, STAI Sufyan Tsauri Majenang
E-mail: zulaekhafh@gmail.com

Abstract

The role of the committee in improving the quality of education is that it is able to assist and coordinate with the school in order to continuously improve quality through the four roles it plays. With the establishment of good communication between the school and the school committee on how to improve the quality of schools, the facilities and infrastructure that support each Madrasah performance in improving quality will be realized. This research was conducted with the aim of describing the role of the School Committee in the effort to improve the quality at MI Ma'arif 03 Limbangan Cilacap. The aspects studied included the role of the School Committee as a provider of consideration, supporter, controller and mediator. This study uses a qualitative approach and the type of research is Field Research. Data collection uses observation, interview and documentation techniques. The instrument used was the researcher himself. The research subjects were the principal and the school committee. The object of the research was the role of the school committee in improving the quality of education. The data analysis process was carried out by data classification, data reduction, data presentation and data verification. The technique of checking the validity of the data used triangulation of sources and methods.

Keywords : School Committee, Education Quality

Diterima 13 Oktober 2020

Revisi 07 Desember 2020

Disetujui 21 Desember 2020

1. PENDAHULUAN

Kajian tentang mutu merupakan kajian yang selalu hidup dan menarik, hal ini disebabkan setidaknya oleh dua alasan utama pendorongnya. *Pertama*, faktor internal, adanya keinginan yang muncul dari sekolah untuk memperbaiki kualitas lembaga sehingga mampu bersaing. *Kedua*, faktor eksternal, adanya tuntutan masyarakat kepada sekolah untuk meningkatkan standar kualitas. Kedua faktor tersebut merupakan faktor dominan ketika berbicara tentang mutu pendidikan.

Pendidikan yang bermutu sejatinya harus disiapkan dengan matang mulai dari guru, kelas, media, metode, hingga semua aspek pendukung keberhasilan pendidikan. Pendidikan dengan berbagai macam persoalannya tidak mungkin bisa dipecahkan oleh lembaga sekolah saja. Sekolah juga perlu mendapat bantuan dari masyarakat untuk terlibat langsung dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta membantu pengembangan program sekolah. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, maka pemerintah membentuk suatu badan pengganti Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) yakni komite sekolah melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 044/U/2002 tanggal 2 April 2002. Komite sekolah adalah suatu badan atau lembaga nonprofit dan non politis dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholder* pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas pendidikan (Fattah, 2012).

Adanya komite sekolah adalah bagian dari pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang hakikatnya adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu di sekolah untuk dapat mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan oleh setiap *stakeholder* pendidikan (Farid, 2013).

Keberhasilan suatu sekolah juga dapat dilihat dari pencapaian kerjasama antara sekolah dengan komite sekolah tersebut. Oleh karena itu, komite sekolah memegang peranan yang sangat penting dan signifikan. Sasaran manajemen pendidikan adalah pengelolaan dan pemberdayaan potensi partisipasi masyarakat untuk memperkuat institusi sekolah, dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan sehingga diperoleh sumber daya manusia yang berdaya saing dan kompeten (Ambarita, 2005). Akan tetapi di banyak kasus, komite sekolah sebagai badan yang mewakili masyarakat belum bekerja secara baik dan optimal sebagaimana yang diharapkan. Kebanyakan komite sekolah hanya dianggap sebagai pelengkap dari sekolah tanpa menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Ditambah lagi kenyataan bahwa kebanyakan dari komite sekolah tidak selalu berada di sekolah, dan mereka memiliki pekerjaan lain di luar tugas mereka sebagai anggota dari komite sekolah. Hal ini membuat tugas dan kewajiban dari adanya komite sekolah menjadi sedikit terhambat dan terkesan kurang optimal. Di kasus lainnya, terkadang komite sekolah menjadikan posisinya sebagai '*bargaining position*', bahkan sebagai '*politik sejawat*', dimana kebijakan sekolah terkadang harus seizin komite sekolah. Dalam posisi ini, komite sekolah bukan lagi sebagai mitra meningkatkan mutu, akan tetapi '*menyandera*' sekolah (Kompas, 2017).

Komite sekolah sangat berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah khususnya di lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam merupakan lembaga yang berorientasi untuk mempersiapkan peserta didik yang meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan tersebut melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks sekolah swasta, peranan komite sangat besar dalam pengembangan baik aspek kuantitas siswa maupun kualitas sekolah. Bahkan eksistensi sekolah dapat dikatakan tergantung dari peran komite sekolah. Komite sekolah ibarat "*sumber cahaya*" bagi sekolah swasta, yang mampu memberikan *feedback* dengan cepat untuk perbaikan, sehingga muara dari mutu adalah jumlah murid. Bagi sekolah swasta "*murid adalah sumber kehidupan*", karena hampir mayoritas sumber pendanaan sekolah berasal dari murid. Sehingga problem mutu bagi sekolah swasta menjadi persoalan lebih serius dan harus disikapi secara cermat.

MI Ma'arif 03 Limbangan Kecamatan Wanareja kabupaten Cilacap merupakan salah satu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang menyikapi dengan serius permasalahan pendidikan terutama yang menyangkut masalah peningkatan mutu pendidikan. Lembaga ini dalam menyikapi permasalahan tersebut tidaklah bekerja sendiri, namun mengikutsertakan pihak komite sekolah sebagai *partner* kerjanya. Langkah ini diambil karena pihak lembaga menyadari bahwa berfikir, berbuat dan bekerja akan lebih baik jika dilakukan dengan bersama (*stakeholders*). Dengan berasumsi bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab semua pihak terutama dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, maka pihak MI Ma'arif 03 Limbangan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap berusaha seoptimal mungkin memberdayakan dan mengikutsertakan keterlibatan komite sekolah dalam segala jenis usaha yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), secara terminologi penelitian lapangan adalah penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, secara terminologi pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang baik secara individu maupun kelompok. Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, langkah peneliti selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan teknik Pengelompokan data (*Data Calcification*), reduksi data (*reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*verification*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Komite Terhadap Sekolah

Peran Komite sebagai Badan Pertimbangan

- 1) Mendata potensi sekolah, pelaksanaan pendataan potensi sekolah tidak dilakukan secara langsung oleh komite sekolah, akan tetapi diserahkan kepada pihak sekolah setelah ada koordinasi dari kedua pihak. Komite sekolah meminta laporan hasil pendataan yang dilakukan oleh sekolah pada setiap tahun sebelum memulai tahun ajaran baru untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Hal ini sebagaimana interview dengan Riswandi selaku kepala sekolah pada 5 Juli 2020:

“Komite sekolah dalam perannya sebagai pemberi pertimbangan tentu kami mengajak komite sekolah untuk berkoordinasi tentang apa saja yang kami butuhkan dalam sekolah, dalam hal ini pendataan potensi sekolah kami menganalisis secara bersama”.

Hasil analisis data potensi sekolah yang meliputi berbagai aspek bidang di sekolah seperti tenaga kependidikan, siswa dan sarana/prasarana digunakan oleh komite sekolah sebagai bahan dalam memberikan masukan dan pertimbangan usulan program kepada kepala sekolah. Selain itu, hasil pendataan juga digunakan untuk menyesuaikan kebutuhan anggaran dengan alokasi dana yang telah disusun dalam RAPBS.

- 2) Memberi pertimbangan dan mengesahkan RAPBS, komite sekolah memberikan masukan dan ikut mengesahkan RAPBS pada setiap tahunnya. Masukan yang diberikan komite sekolah sejauh ini hanya sebatas masukan secara umum, secara khusus kepala sekolah lah yang merumuskan rencana dan merancang pendapatan dan pengeluaran sekolah. Hal ini sebagaimana dalam interview dengan Riswandi selaku kepala sekolah pada 5 Juli 2020:

“Komite sekolah memberikan pertimbangan pada setiap tahunnya terkait pembentukan RAPBS yang kami susun, apabila ada masukan-masukan yang baik dan sifatnya membangun bagi kami dan demi kebaikan madrasah pasti kami akan menerima. Tentu itu semua di dominasi oleh kami yaitu madrasah untuk melakukan tugas kami dengan semestinya, akan tetapi komite sekolah tetap melakukan fungsinya sebagai pemberi pertimbangan dan sebagai mitra bagi kami dalam menentukan keputusan di madrasah ini”.

Komite sekolah lebih banyak langsung memberikan persetujuan terhadap usulan anggaran yang diajukan Kepala sekolah dalam RAPBS, meskipun terkadang komite sekolah juga memberikan masukan-masukan apabila ada yang belum sesuai. RAPBS yang diajukan oleh sekolah sejauh ini dinilai telah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Setiap anggaran dana yang diusulkan kepala sekolah dalam RAPBS selalu mendapat dukungan positif dari komite sekolah. Selain itu, komite sekolah memberikan kepercayaan penuh kepada sekolah untuk merumuskan anggaran yang memang diperlukan oleh sekolah. Bahkan, komite sekolah ikut mencari donatur yang bersedia membantu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan sekolah.

- 3) Memberi pertimbangan terhadap pengelolaan sekolah, hasil observasi yang penulis lakukan, dalam pengelolaan sekolah komite memberikan kewenangan yang lebih luas kepada kepala sekolah untuk mengelola sekolah dan bebas menentukan sistem pengelolaan yang sesuai dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kondisi anggaran yang dimiliki. Komite sekolah tidak/belum pernah menuntut kepala sekolah untuk menggunakan sistem pengelolaan sekolah sesuai dengan kehendak komite sekolah. Hal tersebut bertujuan agar kepala sekolah memiliki kreativitas dan kemandirian penuh untuk mengelola sekolah dalam berbagai hal seperti anggaran, sarana/prasarana, dan siswa. Hal ini sebagaimana dalam interview dengan Riswandi selaku kepala sekolah pada 8 Juli 2020:

“Komite sekolah selalu memberikan kami kebebasan untuk mengelola bagaimana madrasah ini berjalan, karena komite beranggapan bahwa kemandirian madrasah itu sangatlah penting. Komite tidak pernah menuntut kami untuk menggunakan sistem yang komite inginkan, termasuk dalam pengelolaan anggaran dan kurikulum. Dalam hal pengelolaan anggaran selama ini komite memberikan kami keleluasaan untuk mengelolanya, dengan catatan memang sesuai dengan aturan yang ada”.

- 4) Memberi masukan terhadap proses pembelajaran kepada guru, hasil observasi yang telah penulis lakukan, komite sekolah selama ini tidak mengawasi langsung bagaimana pelaksanaan pembelajaran baik di dalam maupun di luar ruangan. Apabila ada yang keluhan atau ada komplain baik dari guru maupun dari wali siswa akan sesuatu hal yang perlu diperbaiki maka komite tidak langsung memberikan saran kepada guru, akan tetapi melalui kepala sekolah terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana dalam interview dengan Jalaludin selaku komite sekolah pada 15 Juli 2020:

"Komite sekolah tidak secara langsung memberikan masukan kepada guru, akan tetapi melalui kepala madrasah dulu. Apabila menurut komite ada yang kurang baik maka komite akan memberi masukan atau semacam sharing tentang masalah kedisiplinan dan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru".

- 5) Memberi pertimbangan untuk menambah dan mengurangi tenaga kependidikan, hasil observasi yang telah penulis laksanakan, indikator kerja komite dalam menambah atau mengurangi tenaga kependidikan sejauh ini sebatas pada pertimbangan pada guru yang diajukan sekolah. Hal ini sebagaimana dalam interview dengan Jalaludin selaku komite sekolah pada 15 Juli 2020:

"Komite tidak berperan dalam hal pengajuan atau pencalonan tenaga pendidik baru, namun komite sekolah memberi pertimbangan dalam penambahan tenaga kependidikan yang diajukan sekolah. Jadi sekolah yang menunjuk calon guru baru kemudian komite memberikan pertimbangan apakah calon guru tersebut sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah atau tidak".

- 6) Memberi pertimbangan anggaran yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah, hasil observasi yang telah penulis laksanakan, berkaitan dengan anggaran yang dapat dimanfaatkan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan, sejauh ini komite sekolah selalu menyarankan untuk memaksimalkan dana yang ada terlebih dahulu. Selanjutnya, apabila sekolah membutuhkan dana tambahan, komite sekolah menyarankan sekolah untuk mencari donatur dan komite sekolah siap membantu mencari donatur bagi sekolah. Selain membantu mencari donatur, komite sekolah banyak memberikan pertimbangan terhadap besar alokasi anggaran untuk masing-masing bidang. Hal ini sebagaimana dalam interview dengan Riswandi selaku kepala sekolah pada 8 Juli 2020:

"Komite selalu menekankan kami untuk memaksimalkan penggunaan dana yang ada, jika dirasa masih ada kekurangan memberi pertimbangan untuk mencarikan donator dan komite pun siap membantu".

- 7) Memberi pertimbangan sarana/prasarana yang diadakan sekolah, hasil observasi yang telah penulis laksanakan, indikator kinerja memberi pertimbangan dalam menambah sarana dan prasarana sejauh ini sudah dapat terlaksana dengan baik. Hal ini sebagaimana dalam interview dengan Riswandi selaku kepala sekolah pada 8 Juli 2020:

"Terkait dengan peran komite dalam pengadaan sarana dan prasarana selama ini sangat berperan. Apalagi MI Ma'arif 03 Limbangan ini adalah sekolah baru sehingga banyak yang diperlukan seperti meja, kursi, ruangan belajar, papan tulis dan lainnya. Komite sekolah dan Sekolah dalam hal ini berkoordinasi langsung dengan kepala sekolah mencatat apa yang dibutuhkan sekolah".

Peran Komite sebagai Pendukung

- 1) Memantau kondisi tenaga kependidikan di sekolah, komite sekolah sejauh ini belum dapat melaksanakan perannya dengan baik. Komite hanya memberi masukan jika dimintai bantuan oleh sekolah.
- 2) Memantau kondisi sarana/prasarana di sekolah, komite sekolah belum dapat melaksanakan perannya dengan baik. Meskipun begitu, komite sekolah ikut berperan dalam mengesahkan anggaran yang sudah dirumuskan dan meminta persetujuan dari wali murid.

- 3) Memobilisasi dan mengkoordinasi bantuan sarana/prasarana, komite sekolah belum dapat melaksanakan perannya dengan baik dikarenakan komite merasa pihak sekolah lebih layak melaksanakannya sendiri, karena sekolah lebih paham mana yang dibutuhkan dan harus di prioritaskan.
- 4) Mengkoordinasi dan memobilisasi dukungan terhadap anggaran pendidikan yang ada di sekolah, komite sekolah sebagai pendukung turut membantu dengan mencari donatur dan menyalurkannya kepada sekolah, khususnya berkaitan dengan dukungan sarana/prasarana. Komite Sekolah terlebih dahulu ke sekolah untuk mengetahui kebutuhan sekolah sebelum terjun ke masyarakat untuk menawarkan kesediaan masyarakat menjadi donatur guna mendukung sekolah, khususnya anggaran pendidikan. Komite membantu mencari donatur apabila pihak sekolah membutuhkan dana sebagai penunjang sarana maupun prasarana.

Peran Komite sebagai Pengontrol

- 1) Mengawasi proses kebijakan, pengawasan proses pengambilan kebijakan, tidak berarti bahwa komite sekolah selalu dilibatkan secara langsung pada saat proses pengambilan keputusan. Kepala sekolah memberikan laporan tentang kebijakan yang diambilnya kepada komite sekolah. Komite sekolah mendukung kebijakan yang telah diambil oleh sekolah, apabila memang sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan sekolah. Sejauh ini komite sekolah tidak/belum pernah melakukan intimidasi dan pemaksaan kehendak tentang keputusan dan kebijakan yang diberlakukan di sekolah. Kepala sekolah diberi keleluasaan untuk mengambil kebijakan yang memang sesuai dengan kebutuhan sekolah dan melaporkan nya kepada komite sekolah.
- 2) Mengawasi ekstrakurikuler di sekolah, hasil observasi yang telah penulis laksanakan, komite sekolah kurang memberi perhatian yang lebih pada ekstrakurikuler baik dalam bidang olahraga maupun bidang lainnya.
- 3) Mengawasi alokasi anggaran, komite sekolah juga melakukan pengawasan terhadap alokasi anggaran tanpa melakukan intimidasi berapa besar anggaran yang direncanakan untuk suatu kegiatan sekolah. Sejauh ini setiap alokasi anggaran yang diajukan oleh sekolah selalu didukung komite sekolah karena dinilai penggunaanya telah sesuai dengan sasaran.

Peran Komite sebagai Mediator

- 1) Menghubungkan sekolah dengan orang tua siswa dan masyarakat, komite sekolah mengadakan rapat dengan sekolah dan orang tua siswa pada awal tahun ajaran baru. Hal ini dilakukan untuk membahas perkembangan sekolah dan rencana pengembangannya satu tahun ajaran ke depan. Melalui rapat itu juga disosialisasikan kebijakan-kebijakan sekolah yang telah berlaku sejauh ini dan juga kebijakan baru kepada orang tua.
- 2) Mengidentifikasi aspirasi atau masukan pendidikan di masyarakat, pertemuan-pertemuan non formal dalam masyarakat dimanfaatkan komite sekolah untuk melakukan identifikasi sumber daya masyarakat dan memfasilitasi aspirasi masyarakat terkait pendidikan di sekolah. Selanjutnya, komite sekolah menawarkan kesediaan orang tua dan masyarakat yang dipandang mampu untuk menjadi donatur dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
- 3) Membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepada sekolah, usulan yang disampaikan kepada sekolah sejauh ini merupakan hasil koordinasi antara komite sekolah, orang tua siswa dan pihak sekolah. Berdasarkan koordinasi itu, komite sekolah memiliki gambaran tentang sekolah sehingga dapat membuat usulan kebijakan dan program yang sesuai dengan kondisi sekolah.
- 4) Mensosialisasikan kebijakan sekolah kepada masyarakat, sosialisasi kebijakan sekolah selama ini lebih memilih menggunakan sosialisasi formal, jadi setiap kebijakan akan disampaikan melalui pertemuan-pertemuan yang telah diadakan komite sekolah seperti rapat tahunan antara komite dengan orang tua siswa.
- 5) Menampung dan mengkomunikasikan pengaduan masyarakat terkait kebijakan sekolah, komite Sekolah menampung serta mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat

tentang pendidikan di sekolah. Beberapa orang tua menyampaikan keluhannya kepada komite sekolah terkait dengan kegiatan anak yang padat sehingga orang tua khawatir anaknya merasa lelah. Berdasarkan keluhan dan pengaduan yang disampaikan masyarakat itulah komite sekolah mengusulkan kepada sekolah untuk merubah pola kegiatan siswa di sekolah atau membuat program baru yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu juga ada beberapa orang tua yang mengeluhkan biaya sekolah yang dirasa tinggi, sehingga orang tua dengan ekonomi menengah ke bawah merasa kesulitan.

- 6) Memobilisasi dan mengkoordinasi bantuan masyarakat untuk pendidikan di sekolah, sementara penawaran kepada orang tua siswa untuk menjadi donatur penyelenggaraan pendidikan di sekolah lebih banyak dilakukan secara formal oleh kepala sekolah dan guru di sekolah. Komite Sekolah menjadi koordinator bantuan yang diberikan oleh masyarakat kepada sekolah. Donatur diberikan alternatif oleh komite sekolah untuk menyampaikan bantuannya melalui komite sekolah atau langsung datang ke sekolah. Bagi donatur yang tidak sempat datang ke sekolah dapat menyampaikan melalui bendahara komite sekolah.

Selain indikator kinerja yang telah terlaksana di atas, terdapat indikator kinerja komite sekolah sebagai mediator yang belum terlaksana yaitu menghubungkan komite sekolah dengan dewan pendidikan setempat. Komite sekolah menilai bahwa sejauh ini komite sekolah maupun sekolah tidak memiliki masalah sehingga kunjungan dan koordinasi dengan dewan pendidikan setempat dapat ditunda.

Tabel 1. Data Peran Komite Terhadap Sekolah

Jenis Peran	Indikator Aktifitas Kinerja
Pertimbangan (advisory agency)	1. Mendata potensi sekolah; 2. Memberi pertimbangan dan mengesahkan RAPBS; 3. Memberi pertimbangan terhadap pengelolaan sekolah; 4. Memberi pertimbangan untuk menambah dan mengurangi tenaga kependidikan; 5. Memberi pertimbangan anggaran yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah; 6. Memberi pertimbangan sarana prasarana yang diadakan sekolah; dan 7. Memberi pertimbangan sarana prasarana yang diadakan sekolah.
Pendukung (supporting agency)	1. Memantau kondisi tenaga kependidikan di sekolah; 2. Memantau kondisi sarana prasarana sekolah; 3. Memobilisasi dan mengkoordinasi bantuan sarana; dan 4. Mengkoordinasi dan memobilisasi dukungan terhadap anggaran pendidikan yang ada di sekolah.
Pengontrol (controlling agency)	1. Mengawasi proses kebijakan; 2. Mengawasi ekstrakurikuler di sekolah; dan 3. Mengawasi alokasi anggaran.
Mediator (executive)	1. Mediator antara orangtua dan masyarakat; 2. Mengidentifikasi aspirasi atau masukan pendidikan di masyarakat; 3. Membuat usulan kebijakan dan program pendidikan di sekolah; 4. Mensosialisasikan kebijakan sekolah kepada masyarakat; 5. Menampung dan mengkomunikasikan pengaduan masyarakat terkait kebijakan sekolah; dan 6. Memobilisasi dan mengkoordinasi bantuan masyarakat untuk pendidikan di sekolah.

Peran Komite Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah

Peran yang telah diupayakan oleh komite sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan telah memberikan dampak atau implikasi dengan kualitas pendidikan dan kepuasan bagi pelanggan pendidikan yang tentu saja itu adalah siswa, wali siswa dan masyarakat. Sebagaimana hasil observasi dan interview dengan Jalaludin selaku komite sekolah pada 15 Juli 2020:

- 1) Perbaikan sarana dan prasarana, Komite dan kepala sekolah selalu berdiskusi tentang apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah, apa saja yang memang perlu di tambah, apa saja yang perlu di perbaiki, apakah ada yang perlu dikurangi, atau perlu untuk pengadaan barang baru. Komite sekolah seringkali menjadi panitia pengadaan sarana maupun prasarana sekolah, sehingga komite terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Dari komunikasi antara komite dan kepala sekolah terwujudlah sarana dan prasarana yang baik, dan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- 2) Prestasi akademik maupun non akademik, kaitannya dengan mutu pendidikan sekolah, maka dapat dilihat dari prestasi sekolah, baik dari prestasi akademik maupun non akademik. Dari segi akademik prestasi yang dapat diamati adalah MI Ma'arif 03 Limbangan dalam lima tahun ini menjadi awal perkembangan sekolah namun siswanya selalu bertambah setiap tahun, dan memiliki keterampilan yang belum tentu dimiliki oleh sekolah yang lain seperti keterampilan membaca al-Barzanzi, menghafal suratan, bermain hadroh, tilawah dan tari. Dari segi non akademik dapat kita amati yaitu, dalam tahun ajaran 2018/2019 saja sudah banyak juara yang di dapatkan sekolah seperti: juara 2 lomba futsal putra se-Distrik Wanareja-Majenang-Dayeuhluhur, Juara 1 lomba tilawah, juara 1 Lomba Pildacil dan mewakili kecamatan Wanareja di Cilacap, juara 1 lomba hafidz cilik, juara 2 lomba cerdas cermat, juara 2 dan 3 lomba solo song putri. Prestasi non akademik yang telah disebutkan diatas dapat menjadi salah satu indikator mutu sekolah.

Pembahasan Peran Komite Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah

Peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan

Berdasarkan deskripsi data diatas menunjukkan bahwa komite sekolah periode 2015-2019 tidak mencantumkan pemetaan kerja bagi setiap anggota komite sekolah. Selain itu peneliti juga tidak mendapatkan dokumen berkaitan dengan program kerja yang dimiliki oleh komite sekolah. Komite sekolah melakukan berbagai kegiatan di sekolah berdasarkan koordinasi dan instruksi dari kepala sekolah. Akan tetapi, komite sekolah telah melaksanakan beberapa indikator kinerja berkaitan dengan keempat perannya sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan sebagai mediator dalam upaya meningkatkan mutu sekolah. Berkaitan dengan pelaksanaan peran komite sekolah tidak dapat dipisahkan antara peran yang satu dan lainnya, akan tetapi dilaksanakan secara terintegrasi dan saling melengkapi. Salah satu contohnya, ketika komite sekolah mencari donatur untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pada saat melaksanakan aktivitas tersebut, komite sekolah melaksanakan perannya sebagai pendukung, sebagai pengontrol khususnya dalam anggaran serta peran sebagai mediator.

Peran Komite Sebagai Pemberi Pertimbangan

Berdasarkan data yang telah diperoleh oleh peneliti bahwa komite sekolah sebagai sudah berperan dalam memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan yaitu komite mengajak pihak sekolah untuk bermusyawarah dalam penentuan kebijakan yang berkaitan dengan RAPBS, pengelolaan sekolah, anggaran yang dapat dimaksimalkan oleh sekolah, maupun tentang sarana dan prasarana. Sesuai dengan indikator kinerja komite sebagai badan pertimbangan yaitu:

- 1) Melakukan pendataan potensi sekolah;
- 2) Memberi pertimbangan dan mengesahkan RAPBS;
- 3) Memberi pertimbangan terhadap pengelolaan sekolah;
- 4) Memberi pertimbangan anggaran yang dapat dimanfaatkan sekolah; dan
- 5) Memberi pertimbangan penambahan/pengurangan tenaga kependidikan di sekolah.

(Engkoswara, 2011).

Peran Komite Sebagai Pendukung

Pelaksanaan peran komite sebagai pendukung dilaksanakan dalam bentuk mengkoordinasi dan memobilisasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah, dengan membantu menyusun RAB dan mencari donatur jika ada kekurangan anggaran, dalam hal ini sekolah tetap memegang hak penuh mengelola anggaran, akan tetapi tetap atas persetujuan dari pihak komite sekolah. Namun ada beberapa hal yang belum dilaksanakan dengan maksimal dan belum sesuai dengan indikator kinerja komite sekolah sebagai pendukung diantaranya adalah:

- 1) Memantau kondisi ketenagakerjaan pendidikan di sekolah;
- 2) Memobilisasi tenaga Pendidikan non guru untuk mengisi kekurangan di sekolah; dan
- 3) Mengevaluasi pelaksanaan dukungan sarana dan prasarana di sekolah.

Peran Komite Sebagai Pengontrol

Peran komite sekolah sebagai pengontrol atau pengawas yaitu mengontrol kebijakan yang diambil oleh sekolah, dan mengevaluasi kebijakan yang sudah terlaksana. Ada beberapa peran pengontrol yang sudah dilaksanakan oleh komite sekolah sesuai dengan indikator kerja komite sekolah diantaranya adalah:

- 1) Mengontrol atau mengawasi proses pengambilan keputusan;
- 2) Mengontrol kualitas kebijakan di sekolah;
- 3) Memantau alokasi anggaran di sekolah; dan
- 4) Memantau pelaksanaan program sekolah.

Selain indikator-indikator kinerja yang telah terlaksana seperti pemaparan diatas, terdapat beberapa indikator yang belum terlaksana yaitu:

- 1) Menilai kualitas kebijakan di sekolah;
- 2) Mengawasi proses dan kualitas perencanaan sekolah;
- 3) Mengawasi kualitas program sekolah;
- 4) Mengawasi sumber daya pelaksana program; dan
- 5) Mengawasi partisipasi sekolah terhadap program sekolah.

Kelima indikator kinerja komite sekolah diatas belum terlaksana karena komite Sekolah memberikan kepercayaan penuh kepada sekolah. Komite sekolah beranggapan bahwa sekolah tidak perlu terlalu didikte secara monoton oleh komite sekolah. Oleh karena itu, sejauh ini komite sekolah selalu memberikan penilaian yang baik terhadap perencanaan yang dibuat oleh sekolah.

Peran Komite Sebagai Mediator

Peran komite sekolah sebagai mediator yaitu menghubungkan sekolah dengan masyarakat menyalurkan usulan kebijakan dari masyarakat kepada sekolah, menyampaikan kebijakan sekolah kepada masyarakat, dan mengelola bantuan yang berasal dari masyarakat dan juga menjadi penghubung antara sekolah dengan dewan pendidikan setempat. Berdasarkan hasil sajian data diatas bahwa komite sekolah sudah menjalankan perannya sebagai mediator sesuai dengan indikator kinerja komite sekolah yaitu:

- 1) Menghubungkan sekolah dengan orang tua siswa dan masyarakat;
- 2) Membuat usulan kebijakan dan program Pendidikan kepada sekolah;
- 3) Mensosialisasikan kebijakan dan program sekolah kepada masyarakat; dan
- 4) Menampung pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap kebijakan program Pendidikan di sekolah serta mengkomunikasikan dengan pihak sekolah.

Komite dan kepala sekolah selalu berdiskusi tentang apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah, apa saja yang memang perlu di tambah, apa saja yang perlu di perbaiki, apakah ada yang perlu di kurangi, atau perlu untuk pengadaan barang baru. Dampak dari komunikasi antara komite dan kepala sekolah terwujudlah sarana dan prasarana yang baik, dan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Mutu menurut (Sallis, 2011) adalah kepuasan terbaik dan tercapainya kebutuhan/keinginan pelanggan. Sedangkan menurut Hensler dan Brunnell dalam (Nasution, 2003) ada empat prinsip utama dalam mutu, yaitu: kepuasan pelanggan, respek terhadap setiap orang, manajemen berdasarkan fakta dan perbaikan berkesinambungan.

Kaitannya dengan mutu pendidikan sekolah, komite sekolah memiliki dampak yang cukup signifikan, dapat dilihat dari prestasi sekolah baik dari prestasi akademik maupun non akademik. Dari segi prestasi akademik yang dapat diamati adalah MI Ma'arif 03 Limbangan dalam lima tahun awal ini selalu bertambah setiap tahunnya. Dari segi non akademik dapat penulis amati yaitu, dalam tahun ajaran 2018/2019 sudah banyak juara yang didapatkan sekolah. Selain dari prestasi akademik dan non akademik, siswa siswi MI Ma'arif 03 Limbangan juga dibekali dengan ilmu

keagamaan yang kuat sehingga meningkatkan kemampuan siswa dalam hal sikap, dan kemampuan menjalankan kewajiban yang menjadi bekal mereka seperti shalat wajib, shalat sunnah, dan membaca al-Quran. MI Ma'arif 03 Limbangan juga terus berbenah diri untuk menjadi madrasah yang berkualitas baik dari segi siswa, guru, sarana dan prasarana juga dengan pengelolaan sekolah dari internalnya dan juga hubungan sekolah dengan masyarakat. Uraian tersebut diperkuat oleh teori dari (Sallis, 2011) bahwa sekolah yang bermutu yaitu sekolah mengupayakan proses perbaikan dengan melibatkan semua orang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya. Sekolah memandang atau menempatkan kualitas yang telah dicapai sebagai jalan untuk memperbaiki kualitas layanan lebih lanjut.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan serta analisisnya diatas terkait dengan peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI Ma'arif 03 Limbangan Kecamatan Wanareja kabupaten Cilacap dapat ditarik kesimpulan diantaranya, *pertama*, peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan yaitu dengan memberikan pertimbangan dalam mendata potensi sekolah, memberi pertimbangan dan mengesahkan RAPBS, memberi masukan terhadap proses pembelajaran kepada guru, memberi pertimbangan anggaran yang dimanfaatkan oleh sekolah, memberi pertimbangan sarana/prasarana yang diadakan sekolah. *Kedua*, peran komite sekolah sebagai pendukung yaitu dengan memberikan dukungan dalam memantau kondisi tenaga kependidikan di sekolah, memantau kondisi sarana/prasarana di sekolah, memobilisasi dan mengkoordinasi bantuan sarana dan prasarana. *Ketiga*, Peran komite sekolah sebagai pengontrol yaitu mengawasi proses kebijakan, mengawasi alokasi anggaran. *Keempat*, peran komite sekolah sebagai mediator adalah menghubungkan sekolah dengan orang tua siswa dan masyarakat, membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepada sekolah, mensosialisasikan kebijakan sekolah kepada masyarakat, menampung dan mengkomunikasikan pengaduan masyarakat terkait kebijakan sekolah, dan memobilisasi dan mengkoordinasi bantuan masyarakat untuk pendidikan di sekolah. Upaya meningkatkan mutu sekolah sudah menjadi suatu kebutuhan bagi banyak kalangan, tidak hanya bagi pelaku pendidikan tapi juga *stakeholder* lainnya. Sebagaimana pendapat Edward Sallis, bahwa sekolah yang berorientasi mutu adalah sekolah yang mengedepankan perbaikan ke arah yang lebih baik. Hasil riset ini dapat mengisi *slot* kinerja mutu yang dilaksanakan oleh komite sekolah, temuan dan terobosan yang dilakukan komite sekolah MI Ma'arif 03 Limbangan ini dapat diadopsi dan dikembangkan di sekolah-sekolah lain yang berorientasi meningkatkan mutu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarita, Alben. (2015). *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Andang. (2014). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Ar. Ruzz Media, Yogyakarta.
- Arbangi, Dzakir, Umiarso. (2013). *Manajemen Mutu Pendidikan*. Cet. 2. Prenadamedia Group, Depok.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet.14. Rineka Cipta, Jakarta.
- Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, *Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Satuan Pendidikan*. <http://pmp.dikdasmen.kemendikbud.go.id> (Jakarta: Kemendikbud, 2016). Diakses 18 April 2020.
- Engkoswara dan Komariah, Aan. (2013). *Administrasi Pendidikan*. Cet. 2. Alfabeta, Bandung.
- Farid, Mohamad. (2013). *Konsep Dasar Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Gaya Media, Yogyakarta.
- Fattah, Nanang. (2012). *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Rosdakarya, Bandung.
- Hanipudin, Sarno. "Pendidikan Islam di Indonesia dari Masa ke Masa." *Matan: Jurnal Islam dan Masyarakat Muslim* [Online], 1.1 (2019): 39-53. Diakses 10 Desember 2020.
- Hanipudin, Sarno. (2009). Konsepsi Guru Modern Dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Al-Munqidz: Jurnal Kajian dan Keislaman*. Vol 8 (No.3) 2020.

<https://ejournal.iaig.ac.id/index.php/amk/article/view/265>

Jalaludin. (2020). *Wawancara*. Komite Sekolah MI Ma'arif 03 Limbangan Cilacap.

Kompas. (2017). <http://amp.kompas.com/nasional/read/2017/01/12/07030841/ada.regulasi.baru.peran.komite.sekolah.diperkuat>

Riswandi, Indra. (2020). *Wawancara*. Kepala Sekolah MI Ma'arif 03 Limbangan Cilacap

Sallis, Edward. (2011). *Manajemen Mutu Pendidikan Terpadu Terjemah Ahmad Ali Riyadi dan Fahrurrozi*. Cet. 2. IRCiSoD, Yogyakarta.